

Analysis of the Role of the Provincial Cooperatives and UKM Office in Improving Community Welfare

by Jurnal Fokus Manajemen

Submission date: 21-Apr-2022 11:51PM (UTC+0900)

Submission ID: 1816388715

File name: 2_Yena_Puspita.pdf (400.28K)

Word count: 3636

Character count: 23661

Analysis of the Role of the Provincial Cooperatives and UKM Office in Improving Community Welfare

Analisis Peran Dinas Koperasi dan UKM Provsu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Yena Puspita ¹⁾; Marliyah ²⁾

^{1,2)} Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam, UIN Sumatera Utara

Email: ¹⁾ yenapuspita863@gmail.com; ²⁾ marliyah@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [6 April 2022]

Revised [13 April 2022]

Accepted [17 April 2022]

KEYWORDS

The Role of Cooperative, Service and UKM, For Society Welfare

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Peran Dinas Koperasi dan UKM Provsu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Yang mana bertujuan untuk mengetahui adapun strategi dan program apa saja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provsu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang mana kesimpulan penelitian UKM salah satunya, pertama, pemberian pelatihan dan pengarahannya tentang pengadaan modal, kedua pemberian jalan keluar untuk mendapatkan modal usaha, ketiga pemberian pelatihan dan pengarahannya dalam meningkatkan produksi barang. Selanjutnya mengenai peran Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adapun peran yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Provsu untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara melakukan seminar ataupun penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat untuk dapat bekuhiner dan mampu membuat usaha mikro atau membentuk koperasi untuk meningkatkan ekonomi baik dari segi ekonomi keluarga maupun ekonomi Negara agar tidak banyak masyarakat yang miskin dan juga pengangguran. Dan juga mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan pinjaman modal atau bagi anggota-anggota koperasi tersebut dengan cara simpan pinjam maksudnya simpan dulu baru pinjam bagi anggota yang sudah bergabung didalam koperasi tersebut. Metode penelitian metode kualitatif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Dan data ini diperoleh dari studi pustaka, wawancara dan observasi untuk mengetahui analisis peran Dinas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

The title of the research is analyzing the role of Cooperative Services and UKM of North Sumatera Provinces in improving society welfare. Training of the research is to know the strategies and programs had done by cooperative service and UKM of North Sumatera Province in improving society welfare. One of the conclusion of UKM research is: firstly, giving training and briefing of capital procurement, secondly, giving an egression to get business capital, thirdly, giving training and briefing in improving goods production. Furthermore, the role of cooperative service and ukm in improving society welfare. The role has dime thy cooperative service and UKM of North Sumatera Province to safe the society by conducting seminars or counseling and training for the society to get beculinary able to create micro business or create the cooperatives to improve the economy both in terms of the family economy and the country's economy so that there are not many people who are poor and also unemployed. And also improve the society welfare by providing capital loans or for members of the cooperative by means saving first and then browing for members who have joined the cooperative. The research method is a qualitative mothod, the words are written or spoken from the the people or subjects are being observed. And this data is obtained from literature studies, interviews and observations to determine the analysis the role of the cooperative service and UKM for improving the society welfare.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah yang berkepanjangan. Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan berbagai program pengurangan kebutuhan yang bekerja sesuai dengan rencana kantor material. (Nasution, 2015). Salah satu teknik untuk mengatasi kebutuhan adalah dengan membuat individu. Agar masyarakat dapat membantu, diperlukan upaya Usaha Kecil Menengah (UMKM) adalah perkumpulan yang bergerak di berbagai bidang usaha, lebih-lebih lagi, usaha perdagangan, usaha pertambangan, usaha masa kini, usaha pemandu pendidikan dan lain-lain. Di Indonesia, UMKM dianggap sebagai kemajuan terbaik dalam mengurangi kebutuhan dan pengangguran. UMKM adalah spesialis keuangan terbesar yang berbeda dalam perekonomian Indonesia dan sangat penting bagi perekonomian setelah krisis terkait ekonomi. Dan kemudian menjadi mitra utama penyesuaian situasi daerah, UMKM juga dapat menjadi lapangan kerja yang cukup besar bagi para pekerja di Indonesia yang sangat membutuhkan tugas di tengah tantangan dalam mengamankan posisi baru di era globalisasi ini. UMKM mana yang menjadi perhatian para pakar publik untuk mendorong unit-unit UMKM tersebut. Selain itu, dengan

kemajuan UMKM yang memiliki kewajiban yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, manfaat ini membuat masyarakat lebih mandiri, membuat masyarakat lebih unik dan imajinatif dalam berpikir dan karenanya memiliki kemajuan untuk memajukan organisasinya (Siagian dan Indra, 2019).

Kemiskinan juga merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai masalah tentang kesejahteraan, seperti ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasar, kondisi keterpencilan, ketertinggalan, ketergantungan, dan juga keterbatasan dalam mengakses layanan sosial. Dan juga kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya alat pemenuh keutuhan ataupun sulitnya akses pekerjaan. Dapat kita ketahui juga bahwa kemiskinan merupakan suatu hal yang sangat membahayakan bagi manusia baik dilingkungan Pusat maupun dilingkungan Provinsi, salah satunya di Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu dari 34 provinsi yang berada di Indonesia tidak lepas dari persoalan kemiskinan dan senantiasa berusaha melakukan pengentasan kemiskinan secara regional yang mana berdampak pada pengentasan kemiskinan secara nasional. Dan kemiskinan yang dapat terjadi dalam suatu wilayah tersebut selalu menjadi masalah yang serius karena dapat kita lihat bahwa kemiskinan itu dampak yang ditimbulkan sangatlah besar. Yang mana orang miskin adalah orang yang tidak akan mampu dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan berdampak pada kekurangan gizi serta juga relatif mendapatkan pendidikan menengah kebawah sehingga juga akan sulit bersaing di pasar tenaga kerja yang mana pada akhirnya akan berdampak dalam masalah pengangguran.

Oleh karena itu kebutuhan akan bantuan pemerintah bagi daerah, bantuan pemerintah terhadap kehidupan seseorang sebenarnya, memiliki banyak tanda kerapian yang dapat diperkirakan. Suyanto (2005) menyatakan bahwa bantuan individu pemerintah dapat digambarkan dengan menurunnya tingkat kebutuhan, kesejahteraan yang lebih baik, dan dapat mempengaruhi peningkatan derajat pengajaran. Juga, meningkatkan efisiensi area lokal. Yang semuanya merupakan kesan meluasnya tingkat kemiskinan. Dan lebih jauh lagi menurut Karnani (2017), di mana kemiskinan harus membidik hal-hal atau dalam kondisi bisnis skala besar yang wajar bagi orang miskin.

Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha untuk dapat meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat, karena dapat kita lihat dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka dari segi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut maka dibutuhkan lapangan kerja yang mampu menyerap angkatan yang ada. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan perlunya kegiatan ekonomi suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan lapangan kerja yang mampu menyerap setiap angkatan yang ada. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya melakukan Usaha mikro Kecil Menengah. Yang mana keberadaan dan keberlangsungan hidup Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ikut dipengaruhi juga oleh kedua faktor internal seperti motif ekonomi dan eksternal yaitu lingkungan dan habitat ekonomi yang menjadi tempat hidup seseorang atau suatu komunitas dalam melakukan kehidupannya.

Keberadaan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam upaya mengatasi permasalahan yang sering dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran yang besar, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang kurang baik. Peran UKM harus mampu mengurangi angka pengangguran yang semakin meningkat dan juga mengatasi kemiskinan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dan juga dalam hal pemerataan pendapatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial khususnya.

Selanjutnya juga dengan koperasi, menurut RM Marrgono Djojohadikoesoemo, berpendapat mengenai koperasi bahwasanya koperasi merupakan suatu perkumpulan organisasi yang misalkan ingin bekerjasama dengan anggota lainnya dalam suatu organisasi tersebut. Yang mana kegiatan dalam organisasi tersebut, yaitu dengan cara untuk memajukan perekonomian dalam suatu organisasi tersebut. Dan juga menurut G Mladenata menyampaikan pendapatnya mengenai koperasi bahwasanya koperasi itu merupakan suatu kumpulan dari produsen-produsen kecil yang bergabung secara bersama yang mana gunanya itu untuk mencapai suatu tujuan bersama (Nuraini et al., 2016). Dan untuk produsen-produsen kecil tersebut melakukan kerjasama dan juga menanggung resiko bersama terhadap usaha yang dikelolanya.

Bantuan pemerintah untuk UKM adalah sesuatu yang sangat kuat di daerah itu sendiri. Pendampingan pemerintah terhadap UKM merupakan suatu kondisi yang menitikberatkan pada keadaan kehidupan individu yang seharusnya terlihat dari tata kehidupan daerah setempat. Dan selanjutnya pekerjaan UKM secara keseluruhan untuk bantuan pemerintah daerah setempat, di mana pekerjaan UKM memiliki situasi sebagai pengusaha bisnis di daerah moneter yang berbeda. Dan selanjutnya

berperan sejauh memberikan posisi terbuka terbesar dan bahkan sebagai pemain penting dalam kemajuan organisasi terdekat.

Dimana program yang dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM adalah latihan-latihan, misalnya bimbingan dan pelatihan, perolehan atau bantuan modal, perluasan organisasi periklanan, pengembangan program asosiasi, dan selanjutnya memiliki penilaian dampak dari program organisasi, serta sebagai menilai konsekuensi dari proyek yang telah dilakukan. melakukan itu. Agar pelaksanaan program peningkatan UKM dapat berjalan dengan sukses, sangat penting bahwa tujuan atau sasaran program harus dicapai dalam waktu yang ditentukan sebelumnya dan juga dapat memberikan keuntungan yang luar biasa bagi UKM, terutama dalam membantu UKM dalam menjaga kekhawatiran mereka, misalnya, seperti modal, SDM, periklanan, dan pemanfaatan inovasi yang luar biasa serta perluasan intensitas UKM terhadap kemajuan globalisasi. Sehingga nantinya mereka dapat berperan sebagai tumpuan perekonomian daerah setempat dan terlebih lagi bantuan pemerintah dari individu-individu Daerah Sumatera Utara.

LANDASAN TEORI

Dinas Koperasi dan UKM adalah lembaga pemerintah yang bertugas dalam menjalankan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Yang mana peran Dinas Koperasi dan UKM sangat diperlukan untuk perkembangan usaha yang mana tujuan untuk meningkatkan peran koperasi dan UKM dengan mewujudkan program-program seperti program pelatihan, pendidikan, dan juga melakukan uji kelayakan pada produk yang telah dihasilkan. Usaha Kecil Menengah mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi yang luas pada masyarakat, juga meningkatkan pendapatan masyarakat serta juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Koperasi

Koperasi dapat dipisahkan menjadi dua bagian, lebih khusus, berkenaan dengan keseluruhan perjanjian dan sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Secara keseluruhan, persetujuan adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang atau elemen-elemen sah yang membantu yang memberikan kesempatan untuk berpisah dan keluar sebagai individu, dengan berpartisipasi secara kekeluargaan dengan individu-individunya. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi dicirikan sebagai suatu unsur usaha yang terdiri dari orang-orang perseorangan atau badan-badan hukum yang membantu dalam hal pelaksanaannya menurut standar-standar yang dapat diperjanjikan serta perkembangan keuangan kelompok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan asas kekeluargaan.

Fungsi Koperasi

1. Yaitu alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional.
3. Juga merupakan salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
4. Alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan bangsa Indonesia serta juga mengatur tata laksanaan perekonomian rakyat.

Peranan Koperasi

1. Yaitu mempersatukan, mengarahkan, membina dan juga mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat gunanya untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang merata.
2. Mempertinggi taraf hidup kecerdasan bagi rakyat.
3. Dan juga membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

Macam-macam Koperasi

1. Koperasi Konsumsi merupakan koperasi yang anggota-anggota terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi, dan juga dengan tujuan mengusahakan pemenuhan barang-barang kebutuhan yang diperlukan para anggota tersebut.
2. Koperasi kredit (simpan pinjam) merupakan koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari setiap orang yang mana mempunyai kepentingan langsung dalam hal lapangan perkreditan. Yang mana lapangan perkreditan ini mengingatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur dan juga memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan tujuan yang bermanfaat untuk penguatan uang jasa serendah mungkin.

3. Koperasi Produksi yang mana koperasi ini sejenis koperasi yang menghasilkan produksi untuk disalurkan baik kepada para anggotanya maupun untuk pasar.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan jenis usaha yang dilihat dari besar kecilnya organisasi keluarga dan perusahaan mandiri yang hanya memiliki 1-20 pekerja. Sementara itu, usaha menengah memiliki antara 21-100 perwakilan. UKM ini telah terbukti menjadi jenis bisnis yang dapat bertahan dalam keadaan darurat keuangan yang pernah terjadi di Indonesia. Hal ini karena penyerapan UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan hampir individu kecil. Terlebih lagi, pengukuran bisnis Indonesia menunjukkan bahwa 99,5% angkatan kerja di Indonesia bekerja di bidang UKM, yang dikenang sebagai salah satu program perbaikan yang disarankan oleh pemerintah Indonesia. pengaturan pemerintah terhadap UKM dibingkai dalam berbagai peraturan dan undang-undang peraturan pemerintah.

Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah tempat di mana daerah mencapai kehidupan yang lebih baik yang mencakup pertama, khususnya peningkatan kapasitas dan distribusi kebutuhan penting yang tidak memihak seperti makanan, penginapan, kesejahteraan, dan asuransi. Juga, yang kedua terkait dengan kehidupan yang berkembang lebih lanjut, tingkat gaji, pengajaran yang lebih baik, dan kualitas manusia. Dan selanjutnya kesejahteraan merupakan suatu perkiraan bagi masyarakat umum yang saat ini dalam kondisi sejahtera. Kesejahteraan juga dapat diperkirakan dari kesejahteraan, keadaan keuangan, kegembiraan dan kepuasan pribadi individu, perspektif pada populasi secara keseluruhan, dan semakin tinggi tingkat sekolah, semakin tinggi tingkat pelatihan, semakin mahir seseorang untuk menemukan ke dalam garis pekerjaan yang ditata dan memperoleh gaji yang memadai, karena kesejahteraan dapat membawa keluarga atau daerah setempat. mampu atau siap untuk mengatasi setiap masalah untuk memiliki pilihan untuk melanjutkan kehidupan yang baik, sehat dan bermanfaat. Oleh karena itu, peran UKM sangat penting karena UKM sangat berpengaruh pada ekspektasi individu akan kenyamanan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (sujarweni, 2015) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan tanpa mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2006:4) metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Yang mana penelitian kualitatif lebih mementingkan pada penjelasan mengenai hubungan antara data yang diteliti, sasaran dalam penelitian kualitatif adalah prinsip-prinsip atau pola-pola yang secara umum dan mendasar, berlaku dan mencolok berdasarkan atas gejala-gejala yang dikaji. Dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik penelitian wawancara dan observasi lapangan, serta menggunakan metode riset studi literatur dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berupa jurnal, buku-buku serta sumber lain yang berhubungan dengan kajian penelitian. Pembahasan penelitian dihasilkan dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa subjek yang berhubungan yaitu para devisi Dinas Koperasi dan Ukm Provsu, terhadap objek yang diteliti analisis peran dinas koperasi dan ukm provsu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun Strategi dan Program Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Dinas Koperasi dan UKM Provsu Untuk Mensejahterakan Masyarakat atau Anggota Koperasi dan UKM nya:

1. Pencapaian Tujuan Koperasi dan Ukm. Dan secara umum, tujuan dari pengembangan UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah memajukan kualitas dan kuantitas UKM serta membantu UKM dari permasalahan-permasalahan yang menghambat perkembangan Ukm, seperti: masalah permodalan, kualitas SDM, Pemasaran, Penggunaan teknologi, dan lainnya.
2. Pemberian Pelatihan dan Pengarahan Tentang Pengadaan Modal. Dimana Koperasi dan UKM memberikan pelatihan dan pengarahan dalam pengadaan modal kepada para usaha-usaha Ukm.



3. Pemberian Jalan Keluar untuk Mendapatkan Modal Usaha. Dan juga Dinas Koperasi dan UKM mengadakan jalan keluar kepada para pelaku usaha-usaha Umkm untuk mendapatkan modal dan menyediakan pelatihan agar memudahkan tiap usaha itu untuk mendapat modal usaha tersebut.
4. Pemberian Pelatihan dan Pengarahan Tentang Pembukuan. Dinas Koperasi dan UKM telah mengadakan berbagai seminar dan pelatihan tentang pembukuan, gunanya untuk membuat pembukuan tiap pelaku usaha-usaha tersebut agar pembukuan di tiap usaha itu berjalan dengan baik dan lancar. Pemberian Pelatihan dan Pengarahan dalam Meningkatkan Produksi Barang. Koperasi dan UKM melakukan kegiatan pelatihan dengan mengadakan seminar dan mengundang para pelaku Umkm-Umkm agar dapat meningkatkan hasil produksi dari usaha yang mereka lakukan.
5. Bantuan Dinas Koperasi untuk Mendapatkan Bahan Baku Produksi. Dengan mengadakan seminar dan pelatihan dapat membantu para pelaku usaha mikro untuk bisa mendapatkan bahan baku produksi dengan ikut seminar tersebut mendapatkan ilmu yang luar biasa.
6. Pemberian Pelatihan dan Pengarahan Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Produksi. Dinas mengadakan pelatihan dan seminar agar para usaha mikro tersebut bisa mendapatkan ilmu dari pelatihan tersebut mengenai penggunaan teknologi untuk mendapatkan produksi yang baik.
7. Pemberian Pelatihan dan Pengarahan untuk Meningkatkan Pemasaran. Dinas Koperasi dan UKM memberikan pelatihan dengan cara membuat jadwal pelatihan mengenai pengarahan untuk meningkatkan pelatihan pemasaran yang baik bagi setiap pelaku usaha mikro (Umkm).
8. Mengenai penyediaan Akses Terhadap Informasi Pasar untuk Memasarkan Produk. Dinas Koperasi dan UKM mengadakan pameran yang mengikutsertakan UKM binaan dinas koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sebagai ajang promosi dan uji pasar serta memperluas saluran pemasaran terutama untuk memperluas pasar ekspor, namun kendalanya masih kurangnya sarana dan prasarana serta dana atau anggaran Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara.

Bagaimana Peran dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provsu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat:

Kemajuan koperasi dalam dua tahun terakhir ini semakin menunjukkan kemajuan, karena semakin banyaknya usaha kecil menengah (UMKM) yang berkembang dan berkreasi, sehingga menyebabkan mereka berlomba-lomba dalam memperoleh pembeli dan keuntungan yang harus dibayar. menjadi pendukung dalam bisnis mereka. Komponen modal juga merupakan bagian yang sama pentingnya dalam membuat usaha kecil menengah (UMKM), dan anehnya tanpa modal banyak organisasi tidak bertahan lama. Karena banyak usaha kecil dan swasta yang ingin mengembangkan usahanya terpaksa dengan modal yang mereka miliki, dan terlepas dari apakah mereka perlu memperoleh uang tunai di bank, mereka tidak memiliki sumber daya yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan uang muka. Oleh karena itu, untuk mempermudah organisasi UMKM, usaha kecil, dan menengah tidak perlu lagi berarti memperoleh dari bank karena sudah ada pengaturan dan pekerjaan untuk mendapatkan modal atau untuk mengembangkan usahanya dari dana Cadangan dan Koperasi Kredit. (KPS).

Fungsi Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas yang mana melaksanakan urusan bidang pemberdayaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha kecil, bidang kelembagaan, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang memang menjadi kewenangan provinsi dan pembantuan kepala daerah provinsi.

Dan untuk fungsinya Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsinya yaitu:

1. Perumusan kebijakan pemekrisaan dan pengawasan koperasi penilaian kesehatan, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil menengah, usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkuan tugasnya.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkuan tugasnya.
3. Pelaksanaan evaluasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkungan tugasnya.
4. Pelaksanaan administrasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan

usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha mikro sesuai dengan lingkuan tugasnya.

5. Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait mengenai tugas dan fungsinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemiskinan adalah masalah yang sangat berbelit-belit untuk ditangani meskipun sebagian besar negara-negara ini telah menang dalam menyelesaikan kemajuan keuangan mereka dengan kecepatan pembangunan yang tinggi dari penciptaan dan pembayaran publik. Kemiskinan adalah gambaran kegagalan individu untuk mengatasi masalah sehingga berbagai upaya dilakukan oleh daerah dan otoritas publik dalam mengurangi kemiskinan. Upaya untuk mengurangi tingkat kebutuhan membutuhkan latihan keuangan untuk memperluas kekuatan dan gaya hidup daerah setempat, dengan alasan bahwa dengan memperluas pembangunan finansial, kebutuhan daerah setempat dapat dipenuhi. Juga, untuk mengatasi masalah area lokal, ada persyaratan untuk posisi terbuka yang dapat menyerap setiap usia saat ini. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kehidupan mencakup usaha, kecil, dan menengah.

Salah satu proyek atau teknik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM adalah, awalnya memberikan persiapan dan arahan tentang pengadaan modal, selanjutnya memberikan jawaban untuk memperoleh modal usaha, dan ketiga memberikan persiapan dan arahan dalam memperluas pengembangan barang dagangan.

Tugas Dinas Koperasi dan UKM dalam menggarap bantuan pemerintah daerah setempat Peran Cabang Koperasi dan UKM Provsu adalah menggarap bantuan pemerintah daerah setempat dengan memimpin kelas atau membimbing dan mempersiapkan masyarakat setempat. Daerah memiliki pilihan untuk memasak dan memiliki pilihan untuk membuat miniatur organisasi atau struktur koperasi untuk lebih mengembangkan perekonomian baik yang menyangkut perekonomian keluarga. lebih jauh lagi, terhadap perekonomian negara gunanya untuk memperkecil individu yang miskin dan lebih jauh lagi pengangguran. Dan selanjutnya bekerja pada bantuan pemerintah daerah dengan memberikan kredit modal atau kepada individu dari membantu melalui dana cadangan dan uang muka tanpa memperoleh dari Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Chan, Y. Peranan Pelatihan Terhadap Pengembangan Pelaku Ukm Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang. *J. Bisnis Corp.* Vol. 3 No. 2 44, 1689–1699 (2018).
- Di, K. & Mandailing, K. Misda sari nim. 17 402 00032. (2021).
- DWIPRADNYANA, I. M. M., PRATIWI, I. G. A. M. A. M. A. & DIATMIKA, I. G. N. D. Strategi Pengembangan Koperasi Di Era Digital Pada Koperasi Yang Ada Di Provinsi Bali. *Maj. Ilm. Univ. Tabanan* 17, 112–116 (2020).
- Febriyanti, P. 2018 *The Authors. Published by Cano Ekonomos. Pengaruh Budaya Organ. Dan Motiv. Kerja Karyawan Terhadap Komitmen Organ. Pada Pegawai Kant. Camat Rambah Kabupaten Rokan Hulu* 7, 42–49 (2018).
- Hutagalung, M. W. R. & Batubara, S. Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *J. Ilm. Ekon. Islam* 7, 1494–1498 (2021).
- Itang. *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam. Journal of Chemical Information and Modeling* (2016).
- Iyan Setiawan. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Learning Tipe Jigsaw Terhadap Keterampilan Sosial dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *J. Penelit. Pendidik. dan Ekon.* 16, 70–81 (2019).
- Kecil, M. et al. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan Ukh). *J. Eksek.* 3, 1–10 (2019).
- Nainggolan, E. *Nainggolan*. 6, 89–99 (2020).
- Purnia, D. S., Adiwisatra, M. F., Muhajir, H. & Supriadi, D. Pengukuran Kesenjangan Digital Menggunakan Metode Deskriptif Berbasis Website. *EVOLUSI J. Sains dan Manaj.* 8, (2020).
- Wika Undari, Anggia Sari Lubis. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *J. Penelit. Pendidik. Sos. Hum.* 6, 32–38 (2021).